



Tiga Kali Berturut-Turut, Gianyar Raih Predikat Opini WTP

GIANYAR - Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, diterima Wakil Bupati Gianyar, Made Agus Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog, Jumat (2/6) di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan LHP diberikan kepada para Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, dimana seluruhnya memperoleh WTP. Dengan raihan ini, Kabupaten Gianyar secara berturut-turut mendapat predikat WTP dimana pada LKPD Tahun Anggaran 2014 dan 2015 juga mendapat WTP dari BPK.

Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan. Antara lain, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat Opini Pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gianyar adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



PEMKAB GIANYAR FOR RADAR BALI

PRESTASI: Wakil Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra (tengah) bersama Wakil Ketua DPRD Made Togog (kiri), menerima LPH dengan predikat WTP.

“Dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, seluruhnya memperoleh Opini Tanpa Pengecualian,” kata Yulindra Tri Kusumo Nugroho.

Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, bahwa predikat Opini WTP yang berhasil diraih Kabupaten Gianyar, merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Dengan raihan WTP ini, diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan berturut-turut meraih WTP kita tidak boleh cepat berpuas diri.

Tetapi menjadikannya sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depannya. Sehingga Gianyar menjadi lebih baik lagi,” terang Mahayastra.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog, mengaku bangga atas pencapaian yang di raih Pemkab Gianyar. Namun, dirinya berharap dengan predikat opini WTP tiga kali berturut-turut ini membuat jajaran di lingkungan Pemkab Gianyar terlena. Tetapi dengan apa yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Dengan raihan predikat opini WTP, kinerja Pemkab Gianyar dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan tata pemerintahan dapat terus ditingkatkan,” pungkas Made Togog. (dra/rba)

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 18



Pemerintah Galau

Underpass atau Flyover

DENPASAR - Pemprov Bali dan pemerintah pusat galau menentukan pilihan underpass (jalan bawah tanah) atau flyover (jalan layang), di Bundaran Bandara Ngurah Rai. Rancangan underpass yang sudah dibuat matang terancam berantakan karena pembangunan underpass rawan diterjang banjir rob dari laut.

Selain itu, pembangunan underpass juga dinilai mahal dibandingkan flyover. Belum lagi pemerintah harus membebaskan lahan warga dan hutan mangrove. Masalah semakin pelik karena di bawah permukaan tanah Bundaran Ngurah Rai ada banyak sambungan pipa. Salah satunya pipa avtur atau pengisian bahan bakar pesawat.

"Kata Pak Gubernur, kalau underpass bagaimana jika ada banjir rob. Tapi, kalau flyover takut bersinggungan dengan adat dan budaya Bali," ujar anggota BPK RI, Rizal Djalil, Rabu (30/5) lalu saat memberikan sambutan rapat paripurna istimewa penyerahan penilaian BPK RI.

Di sisi lain, pemerintah dikedjar waktu untuk mengurai kemacetan. Rizal berharap masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat. "Entah ke atas atau ke bawah, yang penting cepat," tukasnya.

Menanggapi kegalauan pemerintah, Komisi III DPRD Bali meminta pemerintah melakukan komunikasi dengan semua pihak. Terutama elemen masyarakat Bali. "Orang Bali ka-

Kata Pak Gubernur, kalau underpass bagaimana jika ada banjir rob. Tapi, kalau flyover takut bersinggungan dengan adat dan budaya Bali,"

Anggota BPK RI, Rizal Djalil

lau diajak komunikasi, bicara baik-baik pasti ada solusi," kata Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa dikonfirmasi kemarin (2/6).

Menurut Kariyasa, pembangunan underpass atau flyover

sama baiknya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah masalah macet bisa teratasi. Kekhawatiran pemerintah tentang flyover tidak perlu dibesarkan. Sebab, saat ini sudah ada underpass Simpang Dewa Ruci yang di atasnya juga terdapat jalan raya. Pun dengan jalan tol di atas laut yang berbentuk susun. "Sekarang ini bagaimana caranya macet bisa teratasi. Masalah yang ada diselesaikan dengan komunikasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPJN Metropolitan Denpasar, A.A. Gde Sanjaya mengatakan, pihaknya akan memulai pembangunan Underpass pada bulan Agustus 2017. Sebelum bulan Agustus 2017 maka pembebasan lahan baik pembebasan lahan Tahura

Ngurah Rai dan pembebasan lahan masyarakat yang dilakukan oleh Pemkab Badung harus sudah terselesaikan.

Pembebasan lahan untuk underpass Gusti Ngurah Rai ini ada lahan milik penduduk di sisi utara dan ada pembebasan lahan di Tahura Ngurah Rai yang dilaksanakan oleh Pemkab Badung. Dari rencana perkiraan biaya underpass sekitar Rp 209 miliar.

"Underpass ini sepanjang 712 meter lebih panjang dari underpass Dewa Ruci. Nanti underpass ini mulai dari depannya Grand Mas Hotel menuju Runway Bandara. Jalur navigasi runway *gak* ada kena dari proyek ini. Jalan lingkaran atas juga masih tetap," jelasnya. (san/dot)

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 20



Wawali Jaya Negara Terima Piagam WTP dan LHP TA 2016

Pemkot Pertahankan Predikat WTP Lima Kali Berturut-turut Dari BPK RI

DENPASAR- Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan ini menjadi keberhasilan Pemkot Denpasar mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2012. Penyerahan piagam WTP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 dilakukan pada Jumat (2/6) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Maryana Wandira di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Penyerahan LHP dilaksanakan secara bersamaan yang menghadirkan Kepala Daerah Kabupatere/Kota Se-Provinsi Bali yang dilanjutkan dengan pengumuman opini BPK atas hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho. "Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2016 pada sembilan kabupaten/kota yang seluruhnya memperoleh WTP," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho usai menyerahkan LHP kepada masing-masing kepala daerah dan pimpinan DPRD. Lebih lanjut dikatakan LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian. Yakni LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 yang memuat opini pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan



TERSENYUM :
Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Maryana Wandira menerima piagam WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Jumat (2/6) di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Keuangan Pemerintah Daerah dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan. Demi efektifnya hasil pemeriksanaa BPK, sesuai ketentuan dalam pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 mengharapkan seluruh kabupaten/kota dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.

Wakil Walikota I GN Jaya Negara menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI beserta jajarannya yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan. Sehingga pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Karenanya kedepan Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon bimbingan kepada BPK RI dan jajarannya untuk terus melakukan pembinaan, sehingga

keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dikatakan dengan keberhasilan meraih opini WTP ini dapat menjadikan semangat bagi aparatur di Pemkot Denpasar sehingga nantinya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Wayan Maryana Wandira mengatakan DPRD Kota Denpasar sebagai legislator bersama Pemkot Denpasar dengan prestasi WTP yang telah diraih berturut-turut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sehingga WTP tidak semata-merta sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lagi mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemkot Denpasar. "Ini bentuk keseriusan Pemkot Denpasar dengan hasil WTP sebagai prestasi bagi Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. (Adv)

Edisi : Sabtu 3 Juni 2017

Hal : 18